

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya (BPS, 2021). Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk.

Dalam (Kuswanto & Dewi, 2016) kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Selain itu, kemiskinan terjadi karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara

terpisah dari permasalahan pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Di dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, dan akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana Allah berfirman:

س وَتَقْوَىٰ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَهْتَكُوا مَا هَلَكَ عَلَيْكُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ ثَمَرِهِ مَا كَانَ لِغَيْرِكُمْ مِنْهُ ذُو ذُرِّيَّتٍ مِّنْكُمْ وَتَوَلَّىٰ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ أَلَا تُؤْمِنُونَ
 وَتَقْوَىٰ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَهْتَكُوا مَا هَلَكَ عَلَيْكُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ ثَمَرِهِ مَا كَانَ لِغَيْرِكُمْ مِنْهُ ذُو ذُرِّيَّتٍ مِّنْكُمْ وَتَوَلَّىٰ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ أَلَا تُؤْمِنُونَ

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Q.S. An-Nisa’: 9).

Menurut Ibnu Katsir, keturunan yang lemah identik dengan kondisi kekurangan harta hal itu diperkuat dengan penjelasannya mengenai pesan Rasulullah kepada Sa’ad Abi Waqash untuk meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan (Katsir, 1999:222). Jika ditelaah lebih jauh, ayat ini memiliki pesan filosofis yang sangat penting bahwa kemiskinan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga dalam konteks kekinian.

Di dalam teologi pembangunan Islam dan konsep pembangunan ekonomi Islam, terdapat salah satu prinsip bahwa manusia merupakan faktor penting di dalam pembangunan (Abdillah, 2001:66). Faktor kualitas manusia ini pengertiannya lebih dekat dengan problem yang selalu menjadi perhatian banyak kalangan yang sifatnya melekat pada diri manusia yaitu kualitas IPM dan pengangguran. Selain itu, teologi pembangunan Islam juga menyatakan bahwa pembangunan merupakan sebuah keniscayaan (Abdillah, 2001:67). Pembangunan yang dilakukan secara holistik dan integralistik ini tentu akan berdampak pada peningkatan berbagai kualitas dari berbagai objek pembangunan yang ditandai dengan kemajuan pembangunan itu sendiri, termasuk pertumbuhan ekonomi.

Friedman dalam Abilawa (2010), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada: (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lainlain; (3) pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangatlah serius, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan pemerintah. Terdapat banyak variabel makro ekonomi yang dapat dijadikan sebagai penyebab meningkat atau menurunnya kemiskinan yang ada pada suatu daerah.

Menurut Todaro (2000), meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting setiap program pembangunan realistik yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hubungan antara beberapa variabel makro ekonomi dengan kemiskinan, ada yang memberikan dampak positif dan negatif. Seperti halnya apabila masalah belanja pemerintah dihubungkan dengan kemiskinan dimana saat belanja pemerintah meningkat, maka kemiskinan yang ada pada suatu daerah akan menurun.

Dikutip dari detiknews.com Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu propinsi penyumbang daerah tertinggal terbanyak dengan 9 kabupaten tertinggal dari 13 kabupaten/kota, sebagaimana yang diumumkan Presiden Jokowi tentang 122 kabupaten tertinggal. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015. Perpres itu ditandatangani pada tanggal 4 November 2015.

Tabel 1.1

Kabupaten/Kota Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah
tahun 2017-2021

No	Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	Tertinggal	Tidak Tertinggal
1	Kepulauan Banggai	✓	
2	Banggai		✓
3	Morowali		✓
4	Poso		✓
5	Donggala	✓	
6	Tolitoli	✓	
7	Buol	✓	

No	Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	Tertinggal	Tidak Tertinggal
8	Parigi Moutong	✓	
9	Tojo Una-una	✓	
10	Sigi	✓	
11	Banggai Laut	✓	
12	Morowali Utara	✓	
13	Kota Palu		✓

Sumber: detiknews.com (diolah)

Ketimpangan yang terjadi antar kabupaten di Sulawesi Tengah begitu nampak, karena hanya 4 kabupaten/kota yang tidak masuk kategori daerah tertinggal. Diantara 7 kabupaten/kota lainnya masih mengalami ketertinggalan. Pemerintah daerah juga sangat berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan ini. Khususnya Provinsi Sulawesi Tengah diyakini masih banyak penduduk miskin dan sampai sekarang belum benar-benar mendapatkan kehidupan yang layak.

Menurut Soerjono dan Mamudji dalam (Moh, Nugroho, & Rhamadhani, 2015) strategi dan instrumen pemerintah dalam penetapan sasaran pertumbuhan secara efektif pada setiap daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, seperti : (1) Undang - Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah; (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; (3) Undang - Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (4) Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (5)

Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang tentang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan (6) Undang - Undang No.1 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah otomomi daerah ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, maupun alam pada setiap daerah, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pada setiap daerah, Sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sulteng Tahun 2017-2021

Satuan: Jiwa

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Banggai Kepulauan	18,560	18,380	17,540	16,700	16,330	17,502
Banggai	33,500	33,730	29,300	28,160	30,100	30,958
Morowali	16,990	17,030	16,610	16,500	17,070	16,840
Poso	41,880	41,750	39,920	40,200	41,990	41,148
Donggala	54,440	54,280	55,830	53,170	51,230	53,790
Tolitoli	30,640	31,800	30,790	30,510	32,190	31,186
Buol	25,760	25,400	24,510	22,930	23,460	24,412
Parigi Moutong	82,880	83,660	81,360	78,760	76,790	80,690
Tojo Una-una	27,300	27,780	26,360	25,430	25,860	26,546
Sigi	29,550	29,780	30,820	30,000	31,510	30,332
Banggai Laut	11,630	11,970	11,460	11,090	10,920	11,414
Morowali Utara	19,250	19,400	19,250	18,380	18,400	18,936
Kota Palu	25,490	25,260	26,620	26,890	28,600	26,572
Rata-rata	32,143.85	32,324.62	31,566.92	30,670.77	31,111.54	31,563.54

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2021)

Pada Tabel 1.2 data menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami fluktuatif seperti ditunjukkan data diatas bahwa ditahun 2017 rata-rata sebanyak 32,143.85 ribu jiwa, di tahun 2018 mengalami kenaikan rata-rata

sebanyak 32,324.62 ribu jiwa, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 31,566.92 ribu jiwa, di tahun 2020 terjadi penurunan mencapai 30,670.77 ribu jiwa, dan ditahun 2021 mengalami kenaikan rata-rata menjadi 31,11.54 ribu jiwa. Beberapa faktor penyebab naik turunnya grafik kemiskinan di Sulawesi Tengah tentu dilatar belakangi oleh beberapa faktor.

Provinsi Sulawesi Tengah Dalam kurun waktu tersebut (2017-2021) penduduk miskin tercatat paling sedikit pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,920 jiwa di Kabupaten Banggai Laut dan penduduk miskin tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 83.660 jiwa di Kabupaten Parigi Moutong. Rata rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2017-2021 yaitu sebesar 31,563.54 jiwa.

Keberadaan jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang masih relatif besar, dapat menegaskan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan secara masif dalam beberapa tahun terakhir tampaknya tidak cukup efektif untuk memperbaiki taraf hidup penduduk miskin. Semakin tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran pemerintah dalam mengatasinya pun akan semakin besar. Alokasi dana APBN/APBD untuk program-program penanggulangan kemiskinan, dapat dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin turun atau bahkan tidak ada. Namun, fakta yang ada mengindikasikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi hal yang perlu dicermati dan dikaji

ulang khususnya dalam penyusunan dan penerapan strategi dan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.

Berbagai upaya dan bentuk pembangunan ekonomi yang di jalankan oleh pemerintah yang memiliki andil dalam peningkatan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan yaitu adalah PDRB Berikut merupakan besaran PDRB di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2021:

Tabel 1.3

Produk Domestik Regional Bruto Konstan 2010
Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah 2017-2021

Satuan: Juta Rupiah

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Banggai Kepulauan	2,461,853.51	2,563,110.23	2,666,089.19	2,586,580.00	2,735,240.00	2,602,574.59
Banggai	17,294,283.33	18,409,019.17	19,724,807.12	18,579,160.00	18,864,240.00	18,574,301.92
Morowali	13,366,434.00	28,358,400.00	34,085,700.00	43,947,500.00	54,916,240.00	34,934,854.80
Poso	5,744,154.60	6,097,996.82	6,475,826.22	6,224,310.00	6,523,790.00	6,213,215.53
Donggala	7,958,018.00	8,169,958.64	8,623,076.46	8,107,030.00	8,544,440.00	8,280,504.62
Tolitoli	5,193,130.00	5,471,680.00	5,736,410.00	5,539,120.00	5,776,240.00	5,543,316.00
Buol	3,765,179.69	3,919,068.51	4,077,272.76	3,847,270.00	4,029,740.00	3,927,706.19
Parigi Moutong	11,143,109.68	11,658,012.11	12,152,771.04	11,114,290.00	11,621,820.00	11,538,000.57
Tojo Una-una	3,571,752.96	3,706,168.56	3,924,078.16	3,723,860.00	3,878,590.00	3,760,889.94
Sigi	5,769,998.00	6,024,932.00	6,260,619.00	6,084,930.00	6,426,750.00	6,113,445.80
Banggai Laut	1,542,830.76	1,617,642.66	1,674,266.47	1,601,650.00	1,678,040.00	1,622,885.98
Morowali Utara	6,578,529.77	7,163,186.33	7,911,623.87	8,072,840.00	8,916,700.00	7,728,575.99
Kota Palu	14,585,804.68	15,323,729.68	16,180,287.56	15,467,480.00	16,385,580.00	15,588,576.38
Rata-rata	7,613,467.61	9,114,069.59	9,960,986.76	10,376,616.92	11,561,339.23	9,725,296.02

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2021)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebuah aspek yang cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan. Pada Tabel 1.3 merupakan data pertumbuhan ekonomi dan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021 setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2017 PDRB rata-rata senilai 7,613,467.61 juta, di tahun

2018 PDRB naik senilai 9,114,069 juta, tahun 2019 PDRB naik senilai 9,960,989.76 juta di tahun 2020 PDRB senilai 10,376,616.92 juta, dan di tahun 2021 PDRB senilai 11,561339.23.

Jumlah PDRB Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami kenaikan dan dari segi pertumbuhan ekonomi hal tersebut akan berdampak cukup baik bagi perekonomian. Aspek PDRB yang memiliki kaitan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi tentu saja memiliki unsur penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan meningkatnya tingkat PDRB akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sehingga memberikan harapan pada masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan mampu di tingkatkan dan taraf hidup masyarakat akan terus meningkat. Hal ini tentu saja dapat di wujudkan apabila pemerintah mampu memberikan kebijakan dan solusi yang tepat pada strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari data diatas bahwa segala kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil dalam penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai ekspektasi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan

Menurut Penelitian Dio Syahrullah pada tahun 2014 mengenai analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2009-2012 bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan berhubungan

negatif. Penelitian Priyo Adi Nugroho pada tahun 2015 mengenai pengaruh PDRB, tingkat pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta bahwa PDRB berpengaruh signifikan. Kualitas jumlah penduduk menganggur juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya jumlah penduduk miskin.

Kualitas jumlah penduduk menganggur dapat dilihat dari Kenaikan tingkat pengangguran yang bertanda positif akan mengakibatkan kemiskinan menguat. Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya. Tingginya jumlah pengangguran akan berakibat pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Data mengenai jumlah penduduk menganggur di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Tabel 1.4 sebagai berikut.

Tabel 1.4

Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021

Satuan: Jiwa

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Banggai Kepulauan	1,891	2,103	1,246	1,560	1,853	1,731
Banggai	5,480	5,862	4,097	4,841	7,505	5,557
Morowali	1,374	1,482	1,634	3,006	2,944	2,088
Poso	5,170	3,462	3,104	3,527	3,658	3,784
Donggala	4,161	3,809	3,915	3,589	5,180	4,131
Tolitoli	4,348	3,516	3,308	4,255	3,501	3,786
Buol	2,966	3,274	2,961	3,459	2,852	3,102
Parigi Moutong	5,985	6,637	5,617	7,036	7,493	6,554
Tojo Una-una	2,095	3,064	2,530	2,382	2,911	2,596
Sigi	6,075	4,481	3,131	4,159	3,023	4,174
Banggai Laut	998	1,184	1,027	1,130	1,139	1,096
Morowali Utara	1,330	1,443	1,895	3,477	2,006	2,030
Kota Palu	12,496	11,164	12,337	16,960	15,306	13,653
Rata-rata	4,182.23	3,960.08	3,600.15	4,567.77	4,567.00	4,175

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2021)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan jumlah pengangguran di masing-masing kabupaten-kota di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kondisi yang berbeda. jumlah pengangguran tertinggi berada di Kota Palu Pada tahun 2020 dimana tingkat pengangguran berada di angka 16,9 ribu jiwa. kondisi ini di tahun sebelumnya memiliki kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Sementara jumlah pengangguran terendah di kabupaten Banggai Laut pada tahun 2017 yang mencapai angka 998 jiwa, kondisi pengangguran di kabupaten ini memiliki kondisi yang berbeda, Kabupaten Banggai Laut memiliki kondisi yang fluktuatif di setiap tahunnya.

Menurut Michael P. Todaro (2000) ada dua biaya pendidikan, biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan.

Dilihat dari sudut pandang positif belanja pemerintah sektor pendidikan merupakan salah satu peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu daerah dan negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya belanja sektor pendidikan justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam penanggulangan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk menganggur yang ada, sehingga ada yang tidak terserap secara penuh, konsekuensinya terciptalah jumlah penduduk miskin. (Soleh, 2017). Data

mengenai belanja pemerintah sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Tabel 1.5 sebagai berikut.

Tabel 1.5

Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021

Satuan: Ribu Rupiah

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Banggai Kepulauan	835,330	906,110	944,420	968,475	1,000,243	930,916
Banggai	1,213,200	1,207,490	1,393,270	1,465,880	1,643,463	1,384,661
Morowali	1,274,020	1,305,620	1,368,750	1,373,960	1,593,980	1,383,266
Poso	1,978,140	2,012,380	2,035,740	2,068,943	2,114,763	2,041,993
Donggala	924,280	996,800	1,025,560	1,056,782	1,120,700	1,024,824
Tolitoli	1,052,740	1,046,120	1,196,630	1,225,490	1,435,500	1,191,296
Buol	1,304,970	1,618,390	1,362,820	1,457,320	1,359,180	1,420,536
Parigi Moutong	1,359,180	1,460,380	1,622,790	1,674,586	1,834,690	1,590,325
Tojo Una-una	994,870	1,024,520	1,156,610	1,215,847	1,324,500	1,143,269
Sigi	1,067,540	1,182,760	1,199,600	1,285,746	1,398,576	1,226,844
Banggai Laut	629,910	689,550	762,970	799,647	854,982	747,412
Morowali Utara	952,850	1,041,480	1,119,000	1,142,785	1,203,467	1,091,916
Kota Palu	1,277,790	1,351,190	1,405,500	1,437,589	1,563,280	1,407,070
Rata-rata	1,143,447.69	1,218,676.15	1,276,435.38	1,321,003.85	1,419,024.92	1,275,717.60

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kab/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2020 yang memiliki anggaran tertinggi untuk pendidikan berada di Kabupaten Poso dengan anggaran sebesar 2,06 milyar rupiah pada tahun 2020 dan terendah berada di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2017 sebesar 629,9 juta rupiah. Anggaran belanja pendidikan di Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai Laut memiliki trend yang positif yaitu meningkat setiap tahunnya. Rata-Rata anggaran Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021 adalah sekitar 1,23 Milyar. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di muka, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh dari sektor ketenagakerjaan yang diwakili oleh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan

indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Tengah.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Salah satu permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah lambatnya penurunan angka kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya garis kemiskinan. Masalah lainnya belum optimalnya produktivitas pemerataan jumlah penduduk, rendahnya kesejateraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan diwaktu yang akan datang serta kurangnya pengendalian diri dari masyarakat setempat. Data mengenai angka garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Tabel 1.6 sebagai berikut.

Tabel 1.6

Angka Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah tahun 2017-2021

Satuan: Rupiah

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Banggai Kepulauan	300,753	317,475	338,815	364,025	396,904	343,594
Banggai	352,840	373,695	395,700	417,863	457,335	399,487
Morowali	381,753	402,292	428,744	463,140	507,523	436,690
Poso	429,161	449,834	477,801	515,435	561,276	486,701
Donggala	291,011	308,212	336,404	360,483	395,028	338,228
Tolitoli	281,882	299,052	317,448	343,770	378,317	324,094
Buol	314,556	332,163	351,135	375,794	410,824	356,894
Parigi Moutong	366,762	388,440	414,380	444,258	495,623	421,893
Tojo Una-una	417,508	442,186	472,245	504,889	547,910	476,948
Sigi	299,261	316,949	344,631	370,788	409,679	348,262
Banggai Laut	306,611	324,734	335,604	359,768	384,686	342,281
Morowali Utara	392,811	412,942	441,554	474,170	519,441	448,184
Kota Palu	473,555	492,085	522,444	559,246	604,280	530,322
Rata-rata	354,497.23	373,850.69	398,223.46	427,202.23	466,832.77	404,121

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2021)

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa kab/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2021 yang memiliki angka garis kemiskinan tertinggi berada di Kota Palu dengan anggaran sebesar 559 ribu rupiah pada tahun 2021 dan terendah berada di Kabupaten Toli-toli pada tahun 2017 sebesar 281 ribu rupiah. Kondisi garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kondisi yang positif meningkat, ini menandakan bahwa ada peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang kurang mampu di provinsi tersebut. Rata-rata angka garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021 berada di angka 404 ribu rupiah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di muka, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh dari sektor

ketenagakerjaan yang diwakili oleh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Tengah.

Ditinjau dari sector PDRB, Jumlah penduduk menganggur, Belanja pemerintah sektor pendidikan, dan Garis kemiskinan inilah yang akan dikaji hubungannya dengan tingkat Jumlah penduduk miskin yang ada di Sulawesi Tengah tahun 2017-2021 dengan melihat signifikansinya melalui perspektif ekonomi. Dengan demikian, penulis melakukan sebuah penelitian yang akan membahas *“Determinan yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2021”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dibahas diatas, dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan PDRB berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana hubungan Jumlah Penduduk Menganggur berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021?
3. Bagaimana hubungan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021?

4. Bagaimana hubungan Garis Kemiskinan berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen PDRB, Jumlah Penduduk Menganggur, Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Garis Kemiskinan terhadap variabel dependen Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2021:

1. Menganalisis pengaruh dari PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021.
2. Menganalisis pengaruh dari Jumlah Penduduk Menganggur terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021.
3. Menganalisis pengaruh dari Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021.
4. Menganalisis pengaruh dari Garis Kemiskinan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun berbagai manfaat yang akan di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi penulis penelitian ini merupakan sebuah langkah bagi penulis untuk menerapkan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan pada bangku kuliah.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi yang memiliki fungsi untuk mengetahui suatu perkembangan Jumlah Penduduk Miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian yang penulis lakukan ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Jumlah Penduduk Miskin dan perkembangan suatu kondisi Perekonomian yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017-2021.
- b. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijadikan sebagai saran dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan sehingga akan berdampak pada upaya peningkatan tingkat taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.